

BAB II

Kajian Pustaka

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul Penelitian	Nama	Hasil Penelitian
1	Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.	Siti Apridina	Menjelaskan tentang bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Politik. Di Provinsi Sumatera Selatan. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama sama membahas tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perbedaan dan keunikan dalam penelitian ini terletak pada besaran angka Indeks Demokrasi di wilayah Sumatera Selatan dan DKI Jakarta pada tahun 2016. Dimana di Sumatera Selatan mengalami kenaikan paling tinggi diantara tahun lainnya dan

			masuk dalam kategori “Baik” yaitu sebesar 80,95. Sedangkan di DKI Jakarta mengalami penurunan paling rendah selama 11 tahun terakhir yaitu sebesar 70,85. Selain itu perbedaannya terletak pada teori yang digunakan yaitu Teori Sumber Daya Aparatur, sedangkan peneliti menggunakan Teori Sosialisasi Politik.
2	Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Membina Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di Kota Jambi.	Faisal Khoir	Membahas apa saja permasalahan dan isu-isu strategis ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di kota Jambi dan membahas Bagaimana Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam membina ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di kota jambi.

3	<p>Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat</p> <p>Dalam Mensukseskan Pemillihan Kepala Daerah Tahun 2018.</p>	<p>Rahmad Hidayat</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana Bakesbangpoldargri Provinsi NTB dalam mensukseskan Pemilukada di NTB Tahun 2018 dan membahas tentang koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Pilkada (TNI Atau Polri) Dan juga melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada dan penyelesaian masalah pilkada kepada Gubernur.</p> <p>Perbedaan dan keunikan dalam skripsi ini terletak pada kajian masalah yang dibahas, dimana dalam skripsi ini meneliti bagaimana peran Kesbangpol dalam pemilihan kepala daerah di NTB, sedangkan peneliti membahas peran Kesbangpol dalam Pendidikan politik yaitu berupa sosialisasi politik kepada pemuda di Jakarta Barat. Partisipasi politik di NTB juga pada tahun 2018 melebihi target yang</p>
---	--	-----------------------	---

			<p>ditetapkan Provinsi yaitu sebesar 102,91% yang diukur dari penyelenggaraan Pilkada Serentak pada periode 2018-2023. Selain itu, peran Kesbangpol di NTB selain mensukseskan Pemilu, juga ikut melaksanakan sosialisasi politik mengenai konflik vertikal dan konflik horizontal dimana angka kasus konflik dari tahun ke tahun semakin menurun.</p>
4	<p>Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik: Peran Kesbangpol Terhadap Partisipasi Politik pemilih pemula Di Kota Depok Tahun 2018</p>	<p>Cherlinda Hestiane Cahyani</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peranan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok (Kesbangpol) dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pengaruh sosialisasi politik Kesbangpol terhadap partisipasi politik pemilih pemula di Kota Depok Jawa Barat.</p>

			<p>Perbedaan dan keunikan dari skripsi ini terletak pada metode penelitian yang dipakai yaitu metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif sehingga dalam penelitian ini tidak hanya memperoleh data dari hasil wawancara saja, tetapi juga dari hasil survey kepada 100 responden siswa SMA di Depok. Selain itu dari subjek penelitian dalam penelitian ini meneliti siswa SMA di Depok sedangkan penulis meneliti pemuda di Jakarta Barat.</p>
--	--	--	--



5	<p>Sosialisasi Dan Partisipasi Politik Peran Kesbangpol Mendorong Partisipasi politik Masyarakat dalam Pilpres 2019 di Kota Tangerang</p>	<p>Ilham Irmansyah</p>	<p>Kesbangpol Kota Tangerang menyelenggarakan Kegiatan diskusi dan Seminar Partisipasi perempuan dalam partai politik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perempuan dalam partai politik demi keterwakilan masyarakat khususnya perempuan yang pada akhirnya output dari strategi ini adalah peningkatan partisipasi politik masyarakat Kota Tangerang.</p> <p>Perbedaan dan keunikan dalam penelitian ini ialah kajian masalah dan wilayah yang dibahas yaitu mengenai peran Kesbangpol dalam pemilihan Presiden tahun 2019 di Kota Tangerang, dimana pada tahun 2019 tingkat partisipasi mengalami peningkatan yakni sebesar 81,02% dari 70,72%. Selain itu teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Partisipasi Politik oleh Gabriel</p>
---	---	----------------------------	--

			Almond dan Teori Sosialisasi Politik oleh Raga Maran.
--	--	--	---

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan pertama adalah skripsi yang disusun oleh Siti Apridina berjudul "Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Menjadikan Politik. Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan."¹ Dalam skripsi ini, penyusun menjelaskan tentang bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan

¹ Siti apridina, Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Menjadikan Politik. Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan (Sumatera Selatan: Univesitas Sriwijaya, 2020).

fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Politik. Di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian terdahulu yang relevan kedua adalah skripsi yang disusun oleh Faisal Khoir berjudul “Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Membina Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di Kota Jambi.”² Dalam skripsi ini, penyusun menjelaskan membahas apa saja permasalahan dan isu-isu strategis ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di kota Jambi dan membahas Bagaimana Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam membina ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di kota jambi.

Penelitian terdahulu yang relevan ketiga adalah skripsi yang disusun oleh rahmad hidayat berjudul “Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.” Dalam skripsi ini, penyusun membahas tentang Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dalam Mensukseskan Pemilukada Di NTB Tahun 2018 dan Membahas tentang Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pilkada (TNI Atau Polri) Dan Juga Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Dan Penyelesaian Masalah Pilkada Kepada Gubernur.

² Faisal Khoir, Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Membina Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di Kota Jambi (Nusa Tenggara Barat: Universitas Muhammadiyah Mataram. 2020)

Penelitian terdahulu yang relevan keempat adalah skripsi yang disusun oleh Cherlinda Hestiane Cahyani yang berjudul “Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik: Peran Kesbangpol Terhadap Partisipasi Politik pemilih pemula Di Kota Depok Tahun 2018.”³ Dalam skripsi ini, penyusun membahas tentang peranan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok (Kesbangpol) dalam melakukan salah satu fungsinya yaitu, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas. Fokus inti bahasan penelitian ini tentang dengan pengaruh sosialisasi politik Kesbangpol terhadap partisipasi politik pemilih pemula di Depok, Jawa Barat.

Penelitian terdahulu yang relevan kelima adalah skripsi yang disusun oleh Ilham Irmansyah yang berjudul “Sosialisasi Dan Partisipasi Politik Peran Kesbangpol Mendorong Partisipasi politik Masyarakat dalam Pilpres 2019 di Kota Tangerang”.⁴ Dalam skripsi ini, penyusun membahas tentang Kesbangpol Kota Tangerang menyelenggarakan Kegiatan diskusi dan Seminar Partisipasi perempuan dalam partai politik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perempuan dalam partai politik demi keterwakilan masyarakat khususnya perempuan yang pada akhirnya output dari strategi ini adalah peningkatan partisipasi politik masyarakat Kota Tangerang.

³ Cherlinda Hestiane Cahyani. 2020. *Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik; Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018.*(Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah).

⁴ Ilham Irmansyah. 2021. *Sosialisasi dan Partisipasi Politik: Peran Kesbangpol Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilpres 2019 di Kota Tangerang.* (Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah).

B. Studi Pustaka

1. Sosialisasi Politik

a. Pengertian Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik menurut Gabriel Almond adalah proses tempat, sikap, dan pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk. Sosialisasi juga adalah wadah untuk suatu generasi dalam menjelaskan aspirasi-aspirasi dalam politik dan keyakinan politik pada generasi berikutnya.⁵ Dimana sosialisasi politik ini adalah bentuk komunikasi satu arah antar pemateri dan audiens yang membahas tentang kegiatan dan permasalahan politik. Fungsi sosialisasi politik menurut Gabriel Almond sebagai fungsi pemeliharaan sistem politik.⁶


Sosialisasi politik adalah sebuah tindakan yang menjelaskan sikap-sikap politik atau peraturan politik diperoleh suatu masyarakat. Kegiatan sosialisasi politik dapat menjadi wadah generasi pemuda dalam menyampaikan keyakinan politik kepada generasi selanjutnya. Sosialisasi politik adalah sebuah bagian dari proses politik yang dilakukan melalui banyak cara atau narasumber sosialisasi politik beberapa proses politik atau narasumber sosialisasi politik adalah lembaga politik pemerintah partai politik dan media massa.

⁵ <https://ardra.biz/topik/pengertian-sosialisasi-politik-menurut-gabriel-a-almond/>

⁶ Beddy Iriawan Maksudi, Sistem Politik Indonesia (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017) hlm. 42.

Gabriel Almond juga menjelaskan proses sosialisasi sebagai proses pengajaran nilai-nilai masyarakat, dalam hal ini nilai-nilai dan kebudayaan politik, kepada warga negara.

b. Tujuan Sosialisasi Politik



Tujuan sosialisasi politik menurut Richard E. Dawson (penulis buku sosialisasi politik) menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan suatu warisan pengetahuan, nilai-nilai dan pilihan-pilihan politik dari generasi sebelumnya, guru dan wadah-wadah sosialisasi lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang baru beranjak dewasa.⁷ Sosialisasi politik ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan pengetahuan dan ilmu tentang politik di berbagai bidang seperti pemilihan umum, kampanye, dan serap aspirasi (reses).

c. Manfaat Sosialisasi Politik

Manfaat sosialisasi politik antara lain:

- 1) Memperkenalkan serta memperluas pengetahuan wawasan terhadap masalah-masalah politik yang terjadi.

⁷ <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3874343/tujuan-sosialisasi-politik-makna-dan-sarana-dalam-kehidupan-kewarganegaraan>

- 2) Dapat meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik sesuai dengan aturan yang berlaku dan undang-undang yang berjalan.
- 3) Dapat memperbaiki dan memperkenalkan dunia politik kepada masyarakat luas, agar terwujudnya masyarakat yang kenal dengan dunia politik Indonesia secara keseluruhan.

d. Tipe-tipe sosialisasi politik

Pada dasarnya tipe-tipe sosialisasi politik dibagi 2 tipe, yaitu:

1) Sosialisasi politik secara tidak langsung

Sosialisasi politik secara tidak langsung merupakan sosialisasi yang awalnya mengarah pada hal-hal yang sifatnya bukan politik. Selanjutnya masyarakat dipengaruhi untuk orientasi politik.

a) Sosialisasi politik dengan cara magang

Magang adalah suatu aktivitas yang melalui sarana belajar dengan bentuk sosialisasi. Magang di lokasi-lokasi tertentu yang non politik dapat memimpin orang ketika berkaitan lewat dunia politik.

b) Generalisasi

Generalisasi tidak terikat lewat politik, tetapi dapat mempengaruhi orang kepada berorientasi pada politik tertentu.

2) Sosialisasi politik secara langsung

Sosialisasi politik secara langsung merupakan sosialisasi yang tercantum kegiatan yang diorientasikan dan dijelaskan yang bersifat berhubungan dengan hal politik.

a) Pengalaman politik

Adalah sosialisasi politik yang terdapat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan politik atau kegiatan yang karakter umum contohnya terlibat secara langsung dalam kegiatan politik.

b) Pendidikan politik

Adalah sosialisasi dengan pendidikan politik yang sengaja dilakukan dan direncanakan untuk mempengaruhi orang dalam arah-arrah politik tertentu. Pendidikan politik dapat dilakukan dengan kegiatan partai politik, kegiatan politik anggota legislatif dan pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi.



2. Konsep Demokrasi

a. Pengertian Demokrasi

Pengertian demokrasi secara bahasa Yunani yaitu "demos" memiliki arti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "cratos" yang

memiliki arti wewenang atau otoritas. Jadi secara bahasa arti demoscritos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kedaulatan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Menurut Joseph A. Scherer Demokrasi adalah sebuah agenda institusional untuk mencapai ketetapan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sedangkan menurut Henry B. Mayo menjelaskan demokrasi sebagai sistem politik adalah sebuah sistem yang mengarah bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar rakyat banyak oleh perwakilan yang dijaga secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Demokrasi menurut Robert Dahl mendorong kebebasan dalam tiga hal antara lain pemilu yang bebas dan adil dengan menyampaikan pendapat, berorganisasi, memaksimalkan peluang bagi penentuan nasib sendiri serta mendorong otonomi moral dengan mendorong kemampuan untuk memerintah diri sendiri. Selain itu menurut Thomas Carothers demokrasi adalah kebebasan untuk memformulasikan dan

menganjurkan alternatif-alternatif politik bersamaan dengan kebebasan untuk berekspresi, kebebasan berbicara dan kebebasan lainnya.⁸

Makna demokrasi adalah dasar kehidupan bermasyarakat dan sebagai negara, artinya rakyat menyediakan hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, bahkan dalam evaluasi strategi negara, karena strategi negara akan menentukan kehidupan masyarakat. Jadi, negara yang menjalankan sistem demokrasi adalah negara yang dilaksanakan berdasarkan kehendak dan keinginan rakyatnya. Secara organisatoris, demokrasi merupakan penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kekuasaan berada di tangan rakyat.

Kesimpulan-kesimpulan dari beberapa pendapat diatas adalah bahwa inti demokrasi sebagai suatu sistem negara bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kedaulatan ada di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat berisi pengertian tiga macam:

1) Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*)

berisi pengertian yang berkaitan dengan pemerintah yang sah dan juga diakui (*ligimate government*) dimata rakyat. Sebaliknya ada

⁸ Budi Winarno, Globalisasi dan Krisis Demokrasi (Yogyakarta: Medpress, 2007) hlm. 40.

pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unligimate government). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimitasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program- programnya.

2) Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*)

Pemerintah oleh rakyat berarti pemerintah menjalankan kekuasaan untuk kepentingan rakyat, bukan atas kehendaknya sendiri. Pengawasan oleh masyarakat (kontrol sosial) dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat atau tidak langsung (melalui DPR).

3) Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*)

Adalah bahwa kekuasaan yang dipunyai pemerintah yang dipilih dari rakyat, dengan tujuan pemerintah yang mempunyai kekuasaan, memberikan kontribusi positif kepada rakyatnya dalam menyampaikan pendapatnya.

b. Tujuan demokrasi

Pada umumnya demokrasi adalah menciptakan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan utama pada kebebasan dan

keterbukaan kebebasannya ada pada banyak aspek seperti kesejahteraan, makmur, keadilan dan kejujuran.

Tujuan demokrasi berdasarkan poin-nya:

- 1) Kebebasan berpendapat dan berekspresi
- 2) Menciptakan keamanan dan ketertiban serta ketentraman di lingkungan masyarakat.
- 3) Menggerakkan agar masyarakat aktif dalam memilih anggota di pemerintahan seperti pemilu dan pilkada.
- 4) Membatasi kekuasaan pemerintahan, karena dalam negara demokrasi kekuasaan yang paling tinggi ada di tangan rakyat, artinya rakyat punya hak memberi saran dan aspirasi dan juga kritik kepada sistem pemerintahan.
- 5) Mencegah perselisihan. Di setiap lingkungan pasti ada masalah atau konflik, dan diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Sehingga mengurangi adanya perselisihan atau konflik yang terjadi.

3. Kesbangpol

a. Pengertian Kesbangpol

Kesbangpol adalah singkatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan kesbangpol merupakan pelaksana fungsi penunjang urusan pemeritahan provinsi atau kota dan kabupaten.⁹ Untuk memenuhi tugasnya, Kesbangpol melakukan Sebagian tugas pemerintahan daerah, dibidang kesatuan bangsa dan politik. Kesbangpol dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada gubernur atau walikota dan bupati melalui sekretaris daerah.

b. Tujuan dan fungsi Kesbangpol:

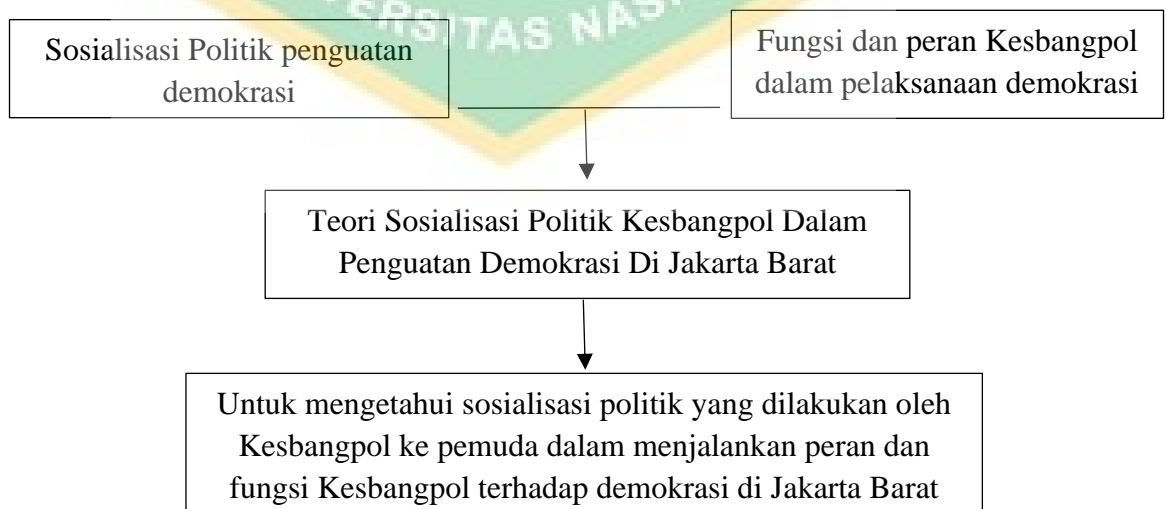
- 1) Program strategis dan program kerja dan bujet Kesbangpol.
- 2) Pengolahan Penyelenggaraan perbenaan dan pembangunan pengetahuan kebangsaan asimilasi persatuan dan kesatuan bangsa termasuk politik demokrasi.
- 3) Fasilitasi pembangunan koneksi antar partai politik, organisasi masyarakat dan LSM.
- 4) pengamatan warga negara asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing.
- 5) Pemeriksaan dan pemantauan penilaian persatuan dan kesatuan bangsa, pembauran pengetahuan kebangsaan, politik, demokrasi, kerukunan umat Bergama serta ketahanan bidang ekonomi dan seni budaya.

⁹ <https://bakesbangpol.jakarta.go.id/v2/pages/tugas-pokok-dan-fungsi>

c. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir ini dipakai untuk menggambarkan bagaimana proses dan alur perbincangan dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk membahas pertanyaan penelitian tentang bagaimana peran Kesbangpol dalam sosialisasi politik memberikan pendidikan politik kepada pemuda di Jakarta Barat. Dalam menemukan hasil penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen yang diperoleh dari Kesbangpol.

Untuk memahami bagaimana proses sosialisasi politik yang dilakukan oleh Kesbangpol, penulis merujuk pada kerangka pemikiran yang dibuat berdasarkan permasalahan dan teori yang digunakan untuk dibahas dengan mendalam mengenai proses persiapan, perumusan, dan rancangan kegiatan sosialisasi politik. Berikut ini merupakan penggambaran kerangka pemikiran penelitian:



Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

Dewasa ini Jakarta sering kali terjadi kasus pelanggaran hukum yang didominasi oleh pelanggaran demokrasi. Selain hal tersebut, banyak juga pelanggaran demokrasi seperti terbatasnya menyampaikan pendapat, aspirasi atau kritik kepada pemerintah secara terbuka di sosial media, aparat yang mencegah atau melarang demonstrasi di jalan dengan alasan berbagai macam seperti misalnya adanya larangan berkerumun akibat pandemi covid-19.

Padahal pemerintah tetap mengadakan pilkada serentak di berbagai daerah. Hak untuk berekspresi dan mengutarakan pendapat di publik, pada dasarnya dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang dan merupakan bagian dari hak asasi manusia, serta esensi dari negara yang berlandaskan demokrasi dan negara hukum. Tetapi faktanya menunjukkan aksi-aksi pemuda dan buruh diharapkan dengan anggota aparat yang represif.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki empat bidang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sub bidang demokrasi dan kebebasan berpendapat menjalankan tugas sebagai menjalankan demokrasi dengan baik dan juga mempertahankan indeks demokrasi indonesia wilayah Jakarta Barat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan untuk mencegah konflik penyingkiran konflik dan perbaikan setelah konflik sesuai dengan perundang-undangan di wilayah provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan pernyataan diatas melahirkan penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: sosialisasi politik Kesbangpol dalam penguatan demokrasi di lingkungan pemuda Jakarta Barat tahun 2018-2020.

